

**LAPORAN PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)  
DAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
TRIWULAN I TAHUN 2024  
BPSIP NTT**



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NUSA TENGGARA TIMUR  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Laporan Survei Persepsi Kualitas Peayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024 di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Nusa Tenggara Timur dapat disusun sesuai dengan rencana. Sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Pertanian no. 32/permentan/ot.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. BPSIP NNT unit penyelenggara pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian telah melaksanakan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024.

Laporan Hasil Pengukuran SPKP dan SPAK ini merupakan evaluasi mandiri terhadap penerapan unit pelayanan yang ada di BPSIP NTT sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan serta sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan zona integritas instansi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran SPKP dan SPAK ini, juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar tingkat persepsi kepuasan masyarakat terhadap unit-unit pelayanan yang ada dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan. Selain itu juga dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut yang tepat guna meningkatkan unit pelayanan yang dirasakan masih rendah. Kepada semua pihak diharapkan saran dan masukannya untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik BPSIP NTT dimasa mendatang.

Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan laporan ini.

Kupang, 28 Maret 2024

Kepala Balai,



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si

NIP. 19670418 199403 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I Kuesioner Survei .....	1
BAB II Metodologi Survei .....	4
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan .....	4
B. Teknik Pengumpulan Data .....	4
C. Teknik Analisis Data .....	4
BAB III Pengolahan Survei .....	6
A. Analisis Hasil Survei .....	6
B. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	7
BAB IV Data Survei .....	11
A. Data Responden .....	11
B. Data Dukung Lainnya .....	12
BAB V Penutup .....	13
A. Kesimpulan .....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Kualitas Pelayanan.....	2
Tabel 2. Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Anti Korupsi.....	3
Tabel 3. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja SPKP.....	5
Tabel 4. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja SPAK....	5
Tabel 5. Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).....	7
Tabel 6. Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).....	8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin.....	6
Gambar 2. Profil Responden Berdasarkan usia.....	7
Gambar 3. Grafik Nilai Indeks SPKP.....	8
Gambar 4. Grafik Nilai Indeks SPAK.....	9

## **BAB I**

### **KUESIONER SURVEI**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT sebagai unit penyelenggara pelayanan penerapan standar dan diseminasi pertanian perlu melakukan survei persepsi kualitas pelayannya (SPKP) dan Survei persepsi anti korupsi (SPAK). Hasil survei tersebut sebagai alat ukur tingkat kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh BSIP NTT berdasarkan persepsi penerima layanan. SPKP dan SPAK dilakukan menggunakan google form yang dapat diakses melalui link [https://Bit.ly/SPKPSPAK\\_BSIPNTT](https://Bit.ly/SPKPSPAK_BSIPNTT) dan scan barcode.

Variabel kuesioner dalam SPKP dirancang dengan memedomani surat edaran menteri PANRB Nomor 04 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona Integritas 2023. Peubah persepsi kualitas layanan dipengaruhi oleh delapan variabel , yaitu :

- a. Informasi layanan;
- b. Persyaratan layanan;
- c. Prosedur layanan;
- d. Jangka waktu layanan;
- e. Tarif/biaya;
- f. Sarana prasana layanan;
- g. Profesionalisme petugas layanan;
- h. Layanan pengaduan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala (jarak) bermakna dan sama. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi kualitas pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Kualitas Pelayanan

No	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
U1	Informasi Layanan	sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan Frequently Ask Question/ FAQ)	1 s.d 6
U2	Persyaratan layanan	informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.	1 s.d 6
U3	Prosedur layanan	informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.	1 s.d 6
U4	Jangka waktu layanan	informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.	1 s.d 6
U5	Tarif/biaya	informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.	1 s.d 6
U6	Sarana prasana layanan	sarana prasarana layanan/sistem layanan online memberikan kenyamanan dan mempermudah pelaksanaan layanan.	1 s.d 6
U7	Profesionalisme petugas layanan	Petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)	1 s.d 6
U8	Layanan pengaduan	sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.	1 s.d 6

Dalam pelaksanaan survei SPAK, responden diberikan lima pertanyaan terkait persepsi anti korupsi. Sementara itu, pilihan jawaban yang diberikan menggunakan skor 1 s.d 6. Skor 1 berarti tidak puas, sedangkan skor 6 berarti sangat memuaskan terhadap persepsi anti korupsi yang ditanyakan dalam kuesioner. Kuesioner survei yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Anti Korupsi

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>
<b>U1</b>	Diskriminasi pelayanan	tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.	1 s.d 6
<b>U2</b>	Indikasi kecurangan dalam pelayanan	tidak ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dll.	1 s.d 6
<b>U3</b>	Praktik pemberian imbalan uang/barang	tidak ada petugas yang menerima /bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, rokok, transport, kopi dll; pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll; pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dll.	1 s.d 6
<b>U4</b>	Praktik pungutan liar (pungli)	tidak ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli biasa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih” dsb.	1 s.d 6
<b>U5</b>	Praktik percaloan/perantara/biro	tidak ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).	1 s.d 6

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Kriteria Responden**

Responden SPKP dan SPAK Triwulan I tahun 2024 pada BPSIP NTT merupakan seluruh pengguna layanan publik BPSIP NTT yang telah menerima pelayanan pada periode bulan Januari – Maret tahun 2024.

#### **B. Metode Pencacahan**

Data yang digunakan pada penilaian survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK) adalah data primer yang pengumpulan datanya dilaksanakan dengan metode kuisisioner menggunakan aplikasi *e-survey* (google form). Populasi pada pengambilan data adalah masyarakat yang menggunakan layanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) NTT. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan masyarakat yang menerima pelayanan selama triwulan I (bulan Januari sampai Maret) tahun 2024. Tahapan pelaksanaan SPKP dan SPAK sebagai berikut :

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei serta Tim Survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Tim survei mengarahkan kepada penerima layanan untuk mengisi kuesioner
5. Tim survey menganalisis data.
6. Tim survey mengkode kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

#### **C. Metode Pengolahan Data dan Analisis**

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi

Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan statistik sederhana yaitu dengan skala likert. Indeks persepsi kualitas pelayanan publik dan Indeks persepsi anti korupsi persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1- 6. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi .Oleh karena itu nilai skala dikonversi ke skala 4.

Tabel 3. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja SPKP

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	
1	1,00 – 2,5996	25,00- 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3, 5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Tabel 4. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja SPAK

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	
1	1,00 – 2,5996	25,00- 64,99	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3, 5324-4,00	88,31-100,00	A	Bersih dari Korupsi

### BAB III

## PENGOLAHAN SURVEI

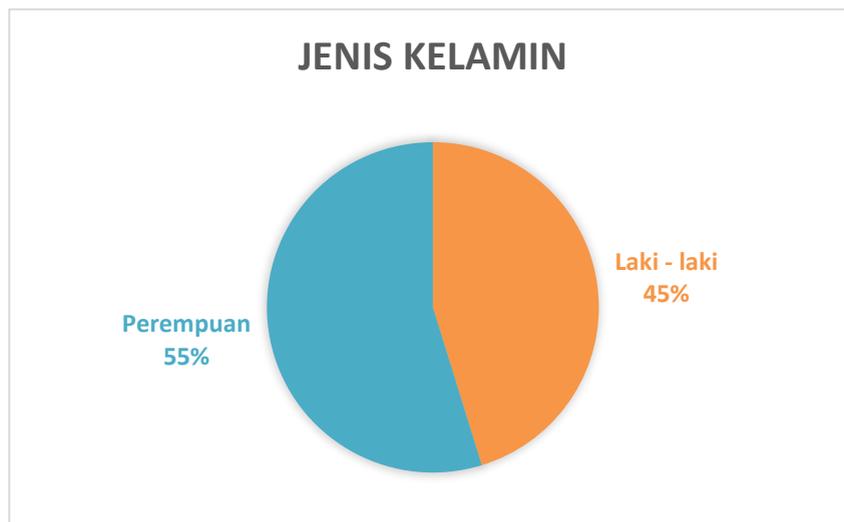
#### A. Analisis Hasil Survei

##### 1. Profil Responden

Responden pada penilaian indeks persepsi kualitas pelayanan di BPSIP NTT sebanyak 42 responden dikategorikan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, asal instansi.

###### a. Jenis Kelamin Responden

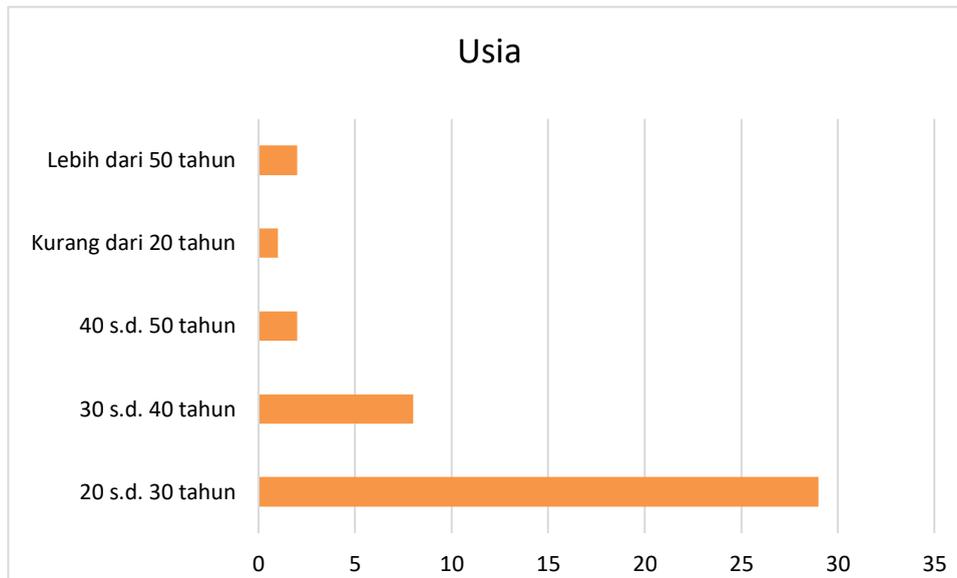
Untuk pengelompokan berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi 2 yaitu laki – laki dan perempuan dengan jumlah 19 orang responden berjenis kelamin laki – laki dan 23 orang untuk responden berjenis kelamin perempuan.



Gambar 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin

###### b. Usia Responden

Untuk pengelompokan berdasarkan usia, responden dengan usia 20 s.d 30 tahun sebanyak 29 orang responden, usia 30 s.d 40 tahun sebanyak 8 orang, usia 40 s.d 50 tahun sebanyak 2 orang, usia kurang dari 20 tahun sebanyak 1 orang dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 2 orang responden.

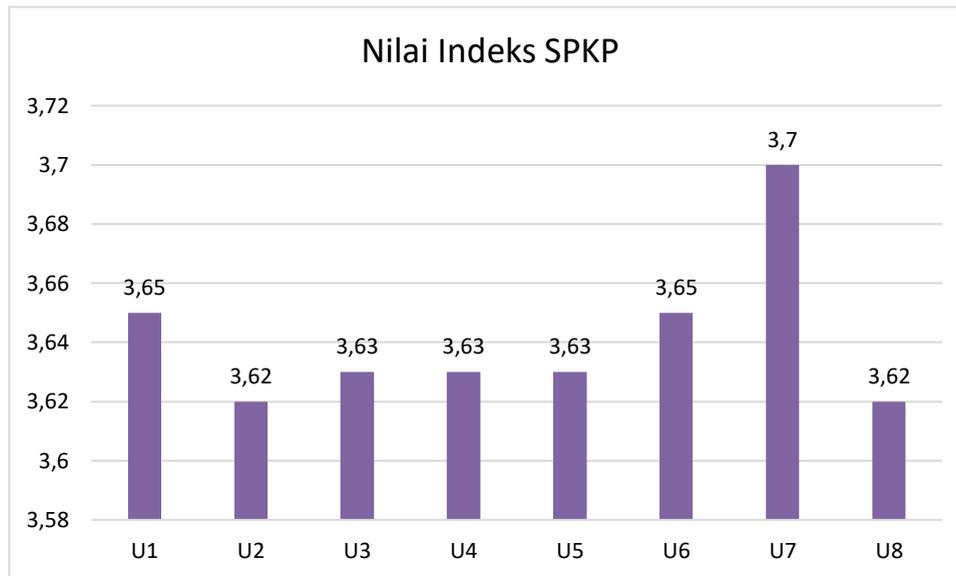


Gambar 2. Profil Responden berdasarkan usia

## 2. Hasil Survei

Tabel 5. Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

No	Indikator	Nilai Indeks	Kategori	Rank
1	Informasi Layanan	3,65	Sangat Baik	2
2	Persyaratan layanan	3,62	Sangat Baik	4
3	Prosedur layanan	3,63	Sangat Baik	3
4	Jangka waktu layanan	3,63	Sangat Baik	3
5	Tarif/biaya	3,63	Sangat Baik	3
6	Sarana prasana layanan	3,65	Sangat Baik	2
7	Profesionalisme petugas layanan	3,70	Sangat Baik	1
8	Layanan pengaduan	3,62	Sangat Baik	4
<b>IPKP</b>		<b>3,64</b>	<b>Sangat Baik</b>	



Gambar 3. Grafik Nilai Indeks SPKP

Keterangan masing-masing Unsur:

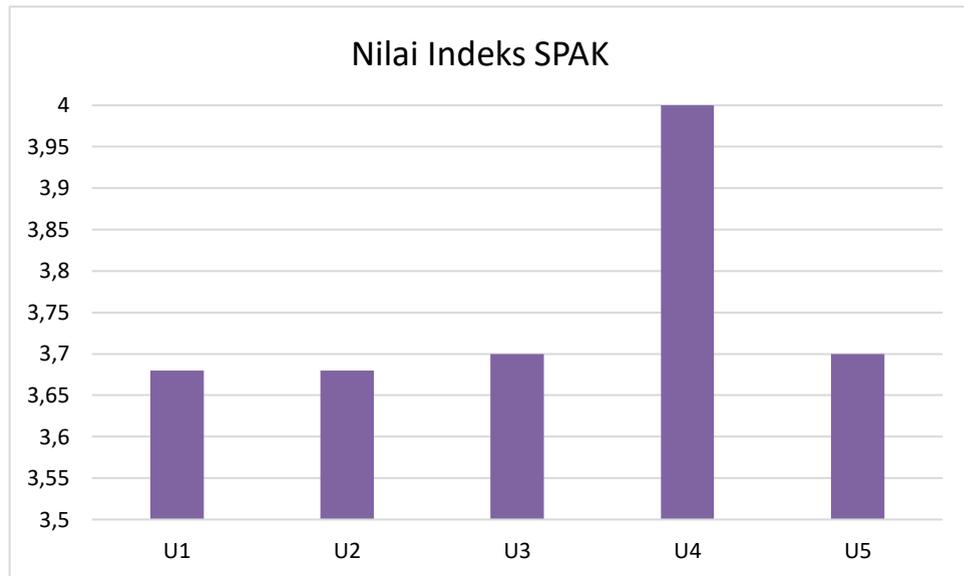
- U1: Informasi pelayanan
- U2: Persyaratan pelayanan
- U3: Prosedur/alur pelayanan
- U4: Jangka Waktu
- U5: Tarif/biaya pelayanan
- U6: Sarana dan prasarana
- U7: Respon pelayanan
- U8: Konsultasi dan pengaduan

Berdasarkan data di atas, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur, unsur U2 yaitu persyaratan layanan dan U8 yaitu konsultasi dan pengaduan memiliki penilaian yang paling kecil apabila dibandingkan dengan unsur lainnya. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan untuk pengajuan layanan serta alur dalam proses pengaduan masih belum diketahui. Namun secara keseluruhan penilaian terhadap seluruh unsur masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Tabel 6. Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

No	Indikator	Nilai Indeks	Kategori	Rank
1	Pegawai BPSIP NTT tidak melakukan diskriminasi terhadap permintaan layanan dari siapapun.	3,68	Sangat Baik	3
2	Pegawai BPSIP NTT memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur	3,68	Sangat Baik	3
3	Pegawai BPSIP NTT tidak menerima imbalan uang, barang, dan atau fasilitas lainnya	3,70	Sangat Baik	2

4	Pegawai BPSIP NTT tidak melakukan pungutan liar atau meminta uang, barang, dan fasilitas lainnya.	4,00	Sangat Baik	1
5	Pegawai BPSIP NTT tidak mempraktikkan percaloan atau pihak perantara dalam pemberian layanan.	3.70	Sangat Baik	2
<b>IPAK</b>		<b>3,75</b>	<b>Sangat Baik</b>	



Gambar 3. Grafik Nilai Indeks SPKP

Keterangan Unsur-Unsur:

U1: Diskriminasi pelayanan

U2: Indikasi kecurangan dalam pelayanan

U3: Praktik pemberian imbalan uang/barang

U4: Praktik pungutan liar (pungli)

U5: Praktik percaloan/perantara/biro

Berdasarkan data di atas, Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Balai penerapan standar instrumen pertanian Nusa Tenggara Timur, unsur U1 dan U2 yaitu diskriminasi pelayanan dan pelayanan diluar prosedur. Hal ini dapat dimungkinkan karena masih ada ikatan kekerabatan atau kekeluargaan sehingga bisa terjadi hal tersebut.

Namun secara keseluruhan penilaian terhadap seluruh unsur masuk dalam kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

## **B. Tindak Lanjut Hasil Survei**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur memperoleh hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik sebesar 3,64 dan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,75. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Rencana tindak lanjut pada unsur-unsur yang memperoleh nilai terkecil adalah dengan pelatihan budaya pelayanan prima, penyediaan beragam sarana untuk konsultasi dan pegaduan, serta peningkatan pengendalian atas penugasan pengawasan secara berjenjang.

## BAB IV DATA SURVEI

### A. Data Responden

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1.	Nurhadi Suwandi	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
2.	ADI RAIHAN SUPARMAN	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
3.	Otriyana paji rowa	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
4.	RISALDUS ELTARI	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
5.	DR. Yong Kim,	Lebih dari 50 tahun	Laki - laki
6.	Nardi Matias Leo	30 s.d. 40 tahun	Laki - laki
7.	Maya Roman	30 s.d. 40 tahun	Perempuan
8.	Frengky Neolaka	30 s.d. 40 tahun	Laki - laki
9.	Deglory Tunmuni.S.Si., M.Si	30 s.d. 40 tahun	Perempuan
10.	Abdonia W. Finmeta	40 s.d. 50 tahun	Perempuan
11.	Dr. Drh. I Gusti Komang Oka Wirawan, M.P	Lebih dari 50 tahun	Laki - laki
12.	YUNTI MISA	30 s.d. 40 tahun	Perempuan
13.	Duanita S. Dengga	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
14.	Susanti Afriana Mantolas	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
15.	Nova yolani loit	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
16.	Suryanti Sabneno	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
17.	Sepriyani Tessa Boimau	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
18.	Aldi Poenamo	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
19.	Lendi Nomleni	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
20.	EMIL SAINAL SELAN	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
21.	REMON SABUIN	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
22.	Tonki M. Sabuna	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
23.	Remigius Binsasi	40 s.d. 50 tahun	Laki - laki
24.	Engelbertus Mau	30 s.d. 40 tahun	Laki - laki
25.	Muhammad Fajri Ismail	30 s.d. 40 tahun	Laki - laki
26.	VICTORIANUS RANGGA	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
27.	Yoyada Togar Selan	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
28.	Wulandari Mapawa	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
29.	Laurensia Avenia	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
30.	Beatrix Dasilva Sani	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
31.	Paskalis Sudirman	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
32.	Brendi Henok Famai	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
33.	Otriyana paji rowa	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
34.	Teroci Ratu Dubu	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
35.	Maria Magdalena Sada Nau	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
36.	Alfonsa Melita Wolla	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
37.	Mariano Allan Mao	20 s.d. 30 tahun	Laki - laki
38.	Stri Asti Welmince Ina	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
39.	Mada Asteda Nakluy	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
40.	Dian Luisa Loemnanu	Kurang dari 20 tahun	Perempuan
41.	Sera yublina Totos	20 s.d. 30 tahun	Perempuan
42.	Marsel Gawi Niga,S.Pd	30 s.d. 40 tahun	Laki - laki

## B. Data Dukung Lainnya

Tautan Link & Barcode Survei : [bit.ly/SPKPSPAK\\_BSIPNTT](https://bit.ly/SPKPSPAK_BSIPNTT)



## Tangkapan Layar Survei SPKP dan SPAK

11qAvzXgB3ifwbDPS\_c14jJgFkoH4hb2o9hqhDHETm9g5A/viewform

### Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

firmangalung07@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

#### Informasi Umum

Dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas pelayanan lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) pada Satker/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan publik dan perilaku antikorupsi pada unit layanan lingkup Kementan, melalui kualitas pelayanan, perilaku penyimpangan pelayanan, evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap, jujur, konsisten dengan kondisi yang sebenarnya. **Identitas responden akan dijamin kerahasiaannya.**

Atas kesediaan dan kerjasama, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian  
Nusa Tenggara Timur

Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si  
NIP. 19670418 1994 03 2001

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur diperoleh Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,64 dengan kategori **“Sangat Baik”** dan Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,75 dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Dengan demikian, petugas layanan BPSIP NTT telah memberikan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu Persyaratan pelayanan yang diinformasikan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan sarana layanan konsultasi dan pengaduan yang beragam.